

# LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) 2024



BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bahan masukan penyusunan LKPJ Bupati Kepulauan Selayar yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan LKPJ ini mengacu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ ini secara garis besar menggambarkan kinerja BKPSDM dengan sarana dan prasarana serta personil yang dimilikinya dan mencakup realisasi anggaran, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas beserta permasalahan dan solusinya pada Tahun Anggaran 2024. BKPSDM telah menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kepegawaian dengan tujuan memenuhi target kinerja yang tercantum pada Renja SKPD 2024 dan Renstra SKPD 2021-2026 BKPSDM dengan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*).

Penyusunan LKPJ ini secara sistematis sudah diupayakan disesuaikan kepada Surat Bupati Kepulauan Selayar Nomor 100/81/XII/2024/Pem tanggal 31 Desember 2024 perihal Penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2024. Dokumen LKPJ yang disusun ini berdasarkan hasil kinerja BKPSDM pada tahun 2024 pada masa kepemimpinan Kepala Badan periode tahun yang bersangkutan dengan mengacu pada Renstra BKPSDM tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan dan perbaikan LKPJ ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKPJ BKPSDM Akhir Tahun Anggaran 2024.

Benteng, 15 Januari 2025

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,

**ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH, SE.,M.M**

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036

## DAFTAR ISI

---

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1. Gambaran Umum BKPSDM .....	1
1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3. Sumber Daya BKPSDM .....	7
<b>BAB II Gambaran Pelayanan BKPSDM</b>	
2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	10
2.1.1 Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan .....	10
2.1.2 Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama .....	25
2.1.3 Capaian Kinerja berdasarkan Urusan .....	26
2.1.4 Analisis kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ...	28
2.1.5 Inovasi .....	29
2.1.6 Prestasi/Penghargaan .....	30
2.2. Kebijakan Strategis Tahun 2021 .....	31
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD .....	31
<b>BAB III Penutup</b> .....	32

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1 Kualifikasi Pegawai menurut Pendidikan .....	9
Tabel 1.2 Kualifikasi Pegawai menurut Golongan .....	9
Tabel 1.3 Kualifikasi Pejabat Struktural .....	10

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1 Foto Kantor BKPSDM .....	1
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BKPSDM .....	7

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Gambaran Umum BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia disingkat BKPSDM adalah instansi pemerintah yang membantu tugas Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Kedudukan BKPSDM diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar.

**Gambar 1.1**  
**FOTO KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan instansi pemerintah Tipe A yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, terletak di koordinat -6.1208390 Lintang Selatan dan 120.4666590 Bujur Timur, dengan alamat email [bkppd@kepulauanseyarkab.go.id](mailto:bkppd@kepulauanseyarkab.go.id).

## **1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM**

Susunan organisasi serta tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan fungsi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. Pelaksanaan administrasi Badan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

### **2. Sekretaris**

Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua

unsur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan fungsi Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian penyusunan program, pelaporan dan hukum;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

❖ **Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum**

Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, asset serta pengelolaan kepegawaian dan Perundang-undangan.

❖ **Kepala Subbagian Program**

Tugas Kepala Subbagian Program adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.

❖ **Kepala Subbagian Keuangan**

Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah membantu Sekretaris melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

**3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian**

Tugas Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dan fungsi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **4. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan**

Tugas Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan dan fungsi Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang mutasi, promosi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **5. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur**

Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia aparatur dan fungsi Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan kompetensi aparatur;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **6. Kelompok Jabatan Fungsional**

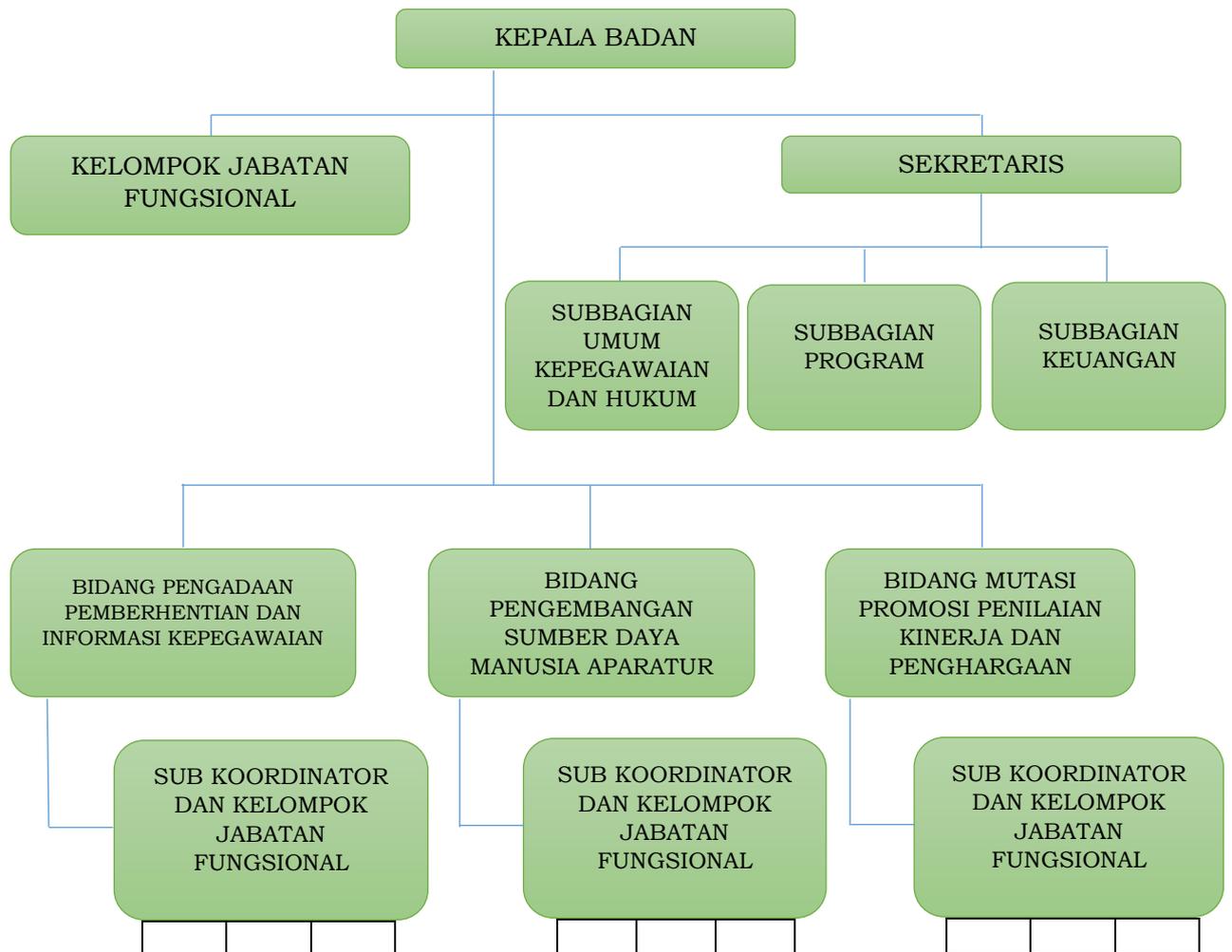
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat Badan, terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Hukum;
  - 2. Sub Bagian Program;
  - 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar 1.2 :

**Gambar 1.2**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**



BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
  1. Subbagian Program;
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
  3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### 1.3 Sumber Daya BKPSDM

Jumlah pegawai di BKPSDM Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan data sampai dengan Bulan Desember 2024 sebanyak 42 orang, dengan klasifikasi menurut pendidikan dan pangkat/golongan serta jumlah pejabat struktural.

**Tabel 1.1**  
**KUALIFIKASI PEGAWAI MENURUT PENDIDIKAN**

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	S2	7	16,6%
2	S1/DIV	26	62%
3	D3	2	4,8 %
4	SLTA	7	16,6%
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai BKPSDM mayoritas berpendidikan S1/DIV yaitu sebanyak 26 orang atau 62%, selanjutnya yang berpendidikan SLTA sebanyak 7 orang atau 16.6%, selanjutnya yang berpendidikan S2 yaitu sebanyak 7 orang atau 16.6% dan berpendidikan D3 yaitu sebanyak 2 orang atau 4.8%. Hal ini menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan pegawai BKPSDM sudah memadai.

**Tabel 1.2**  
**KUALIFIKASI PEGAWAI MENURUT GOLONGAN**

<b>NO</b>	<b>GOLONGAN/RUANG</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1	Golongan IV/d	-	0
2	Golongan IV/c	-	0
3	Golongan IV/b	-	0
4	Golongan IV/a	3	7,1
5	Golongan III/d	9	21,4
6	Golongan III/c	6	14,2
7	Golongan III/b	5	12
8	Golongan III/a	10	24
9	Golongan II/d	3	7,1
10	Golongan II/c	3	7,1
11	Golongan II/b	-	0
12	Golongan II/a	-	0
13	Golongan IX	3	7,1
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>100</b>

**Tabel 1.3**  
**KUALIFIKASI PEJABAT STRUKTURAL**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
1	KEPALA BADAN	-	-
2	SEKRETARIS	1	14,2
3	KEPALA BIDANG	3	42,9
4	KEPALA SUBBAGIAN	3	42,9
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>100</b>

## BAB II

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

#### 2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 2.1.1 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TIDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	DPA BKPSDM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Alokasi Anggaran Rp.7.083.193.000,-	Realisasi Anggaran Rp.6.819.067.029 ,-			
			DPA BKPSDM	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran Rp.33.991.400,-	Realisasi Anggaran Rp.30.915.200,-			

			DPA BKPSDM	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.16.018.500,-	Realisasi Anggaran Rp.15.302.600,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.2.476.800,-	Realisasi Anggaran Rp.1.997.600,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.2.995.000,-	Realisasi Anggaran Rp.2.625.800,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp2.313.000,-	Realisasi Anggaran Rp.2.128.500,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Laporan	1 Laporan			

					Alokasi Anggaran Rp.2.975.000,-	Realisasi Anggaran Rp.2.653.000,-			
			DPA BKPSDM	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.3.963.400,-	Realisasi Anggaran Rp.3.445.500,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi	2 Laporan	2 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.3.249.700,-	Realisasi Anggaran Rp.2.762.200,-			
			DPA BKPSDM	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.3.854.393.150,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.3.718.617.621,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.3.770.793.000,-	Realisasi Anggaran Rp.3.640.632.121,-			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.48.632.200,-	Realisasi Anggaran Rp.46.378.200,-			

			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp16.873.500,-	Realisasi Anggaran Rp.15.022.200,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.2.500.000,-	Realisasi Anggaran Rp.2.176.500,-			
			DPA BKPSDM	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.15.594.450,-	Realisasi Anggaran Rp.14.408.600,-			
			DPA BKPSDM	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.12.837.400,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.11.432.700,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.12.837.400,-	Realisasi Anggaran Rp.11.432.700,-			

			DPA BKPSDM	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.7.937.700,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.6.363.500,-</b>			
			DPA BKPSDM	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.7.937.700,-	Realisasi Anggaran Rp.6.363.500,-			
			DPA BKPSDM	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.519.838.300,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.509.672.163,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 paket	100 paket			
					Alokasi Anggaran Rp.8.633.000,-	Realisasi Anggaran Rp.7.387.000,-			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	3 Paket			
					Alokasi Anggaran Rp.16.370.900,-	Realisasi Anggaran Rp.15.890.000,-			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Paket	12 Paket			
					Alokasi Anggaran Rp.21.544.400,-	Realisasi Anggaran Rp.18.317.500,-			

			DPA BKPSDM	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4 Dokumen	4 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.13.250.000,-	Realisasi Anggaran Rp.8.120.000,-			
			DPA BKPSDM	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.420.040.000,-	Realisasi Anggaran Rp.420.032.463,-			
			DPA BKPSDM	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.10.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.9.925.200,-			
			DPA BKPSDM	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.30.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.30.000.000,-			
			DPA BKPSDM	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.118.028.750,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.100.082.912,-</b>			

			DPA BKPSDM	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.14.698.400,-	Realisasi Anggaran Rp.12.549.000,-			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.93.330.350,-	Realisasi Anggaran Rp.77.533.912,-			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 Laporan	40 Laporan			
					Alokasi Anggaran Rp.10.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.10.000.000,-			
			DPA BKPSDM	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.101.220.000,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.93.785.700,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 Unit	25 Unit			
					Alokasi Anggaran Rp.101.220.000,-	Realisasi Anggaran Rp.93.785.700,-			

			DPA BKPSDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Alokasi Anggaran Rp.1.479.203.000,-	Realisasi Anggaran Rp.1.423.488.090,-			
			DPA BKPSDM	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Alokasi Anggaran Rp.474.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.464.853.754,-			
			DPA BKPSDM	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.18.714.000,-	Realisasi Anggaran Rp.18.171.700,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.286.970.000,-	Realisasi Anggaran Rp.281.025.374,-			
			DPA BKPSDM	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.19.553.000,-	Realisasi Anggaran Rp.18.286.000,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Tahun	1 Tahun			

					Alokasi Anggaran Rp.19.138.000,-	Realisasi Anggaran Rp.18.983.300,-			
			DPA BKPSDM	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.80.188.000,-	Realisasi Anggaran Rp.79.581.780,-			
			DPA BKPSDM	Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.30.323.000,-	Realisasi Anggaran Rp.29.942.100,-			
			DPA BKPSDM	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Tahun	1 Tahun			
					Alokasi Anggaran Rp.19.114.000,-	Realisasi Anggaran Rp.18.863.500,-			
			DPA BKPSDM	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.567.000.500,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.531.078.250,-</b>			
			DPA BKPSDM	Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.48.400.000,-	Realisasi Anggaran Rp.39.184.500,-			

			DPA BKPSDM	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	700 Dokumen	700 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.78.600.000,-	Realisasi Anggaran Rp.76.584.400,-			
			DPA BKPSDM	Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.440.000.500,-	Realisasi Anggaran Rp.415.309.350,-			
			DPA BKPSDM	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.378.602.500,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.375.010.186,-</b>			
			DPA BKPSDM	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	10 orang	10 orang			
					Alokasi Anggaran Rp.312.992.500,-	Realisasi Anggaran Rp.310.003.100,-			
			DPA BKPSDM	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	13 orang	13 orang			
					Alokasi Anggaran Rp.65.610.000,-	Realisasi Anggaran Rp.65.007.086,-			
			DPA BKPSDM	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.59.600.000,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.52.545.900,-</b>			

			DPA BKPSDM	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen			
					Alokasi Anggaran Rp.39.600.000,-	Realisasi Anggaran Rp.34.536.100,-			
			DPA BKPSDM	Pembinaan Disiplin ASN	37 orang	37 orang			
					Alokasi Anggaran Rp.20.000.000,-	Realisasi Anggaran Rp.18.009.800,-			
			<b>DPA BKPSDM</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.955.743.300,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.924.709.143,-</b>			
			DPA BKPSDM	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.254.268.600,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.252.423.200,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintah Kongkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	28 orang	28 orang			

			DPA BKPSDM	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Alokasi Anggaran Rp.701.474.700,-</b>	<b>Realisasi Anggaran Rp.672.285.943,-</b>			
			DPA BKPSDM	Penyelenggaraan, Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan, Kepemimpinan dan Prajabatan	PKN 2 orang PKA 8 orang PKP 3 orang PPPK 189 orang	2 orang 8 orang 3 orang 189 orang			
					Alokasi Anggaran Rp.701.474.700,-	Realisasi Anggaran Rp.672.285.943,-			

### 2.1.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Urusan Kepegawaian						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
1.	Nilai SAKIP OPD	-	Nilai	B	-		Belum direviu Itkab
2.	Laporan Keuangan OPD sesuai sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		-	Sesuai	sesuai		
1.	Jumlah yang telah mengikuti Pengembangan SDM melalui peningkatan Pendidikan Lanjutan	<i>Program Kepegawaian Daerah</i> - Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan	%	10	10	100%	Dari 10 orang yang ditargetkan mendapatkan bantuan Tugas Belajar terealisasi 10 orang yang menerima bantuan Tugas Belajar dan Meninggalkan Tempat.

2.	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Uji Kompetensi	<i>Program Kepegawaian Daerah</i> - Kegiatan: Pembangunan Kompetensi ASN - Sub Kegiatan : Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fungsional	%	20	74	100%	
----	--	--	---	----	----	------	--

### 2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Urusan Kepegawaian</b>					
	<b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>					
1.	Persentase Pemenuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah	%	92,60%	96,00%	96,00%	Persentase pemenuhan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 target 92,60% dan terealisasi 100% Keterangan : Persentase pemenuhan ASN Tahun 2024 Yang terdiri dari 50 Formasi CPNS dan 80 Formasi PPPK. Dari 50 Formasi CPNS terealisasi sebanyak

						46 diantaranya 41 Tenaga Teknis dan 5 Tenaga Dokter, dan 80 Formasi PPPK tenaga teknis terealisasi sebanyak 80 orang.
2.	Persentase Pegawai Berkinerja Baik	%	100%	99,93%	99,93%	Persentase Pegawai Berkinerja Baik Tahun 2024 Target 100% terealisasi 99,93% Keterangan: Persentase Pegawai Berkinerja Baik Tahun 2024 tidak mencapai target dikarenakan Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pembinaan Disiplin baik itu ringan, sedang dan berat berjumlah 3 orang
3.	Cakupan ASN yang lulus Diklat Kepemimpinan/Manajerial, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis	%	81%	91,6%	91,6%	Cakupan ASN yang lulus Diklat kepemimpinan/manajerial, fungsional dan teknis Tahun 2024 Target 81% dan terealisasi 91,6% Keterangan: Cakupan ASN yang lulus Diklat mencapai target.

**2.1.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH  
DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TARGET ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN (%)	JUMLAH INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RATA-RATA TINGKAT KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (%)	JUMLAH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RATA-RATA KETERCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Urusan Kepegawaian</b>								
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.083.193.000,-	6.819.067.029,-	243.472.365,-	96,28%	3	100%	13	100%

## 2.1.5 INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/MANFAAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Aplikasi Pensiun (SIMPOLE)	<p>Terwujudnya digitalisasi dokumen pensiun dengan penerapan aplikasi layanan pensiun secara online sehingga proses pengurusan berkas pensiun menjadi cepat dan tepat</p> <p>Terwujudnya proses pengusulan pensiun yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar</p> <p>Terwujudnya pelayanan penertiban SK pensiun PNS yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Pensiun Online</p>	<p>Kemudahan akses dalam layanan pensiun dan percepatan penerbitan SK Pensiun serta Penerbitan SK Pensiun tepat waktu</p>	
2	Aplikasi E-Pangkat	<p>Terwujudnya digitalisasi dokumen kenaikan pangkat dengan penerapan aplikasi layanan kenaikan pangkat secara online sehingga proses pengusulan berkas menjadi cepat dan tepat</p> <p>Terwujudnya proses pengusulan kenaikan pangkat yang tepat dan cepat bagi semua Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar</p> <p>Terwujudnya pelayanan penerbitan SK kenaikan pangkat yang optimal dengan penggunaan Sistem Teknologi Informasi Kenaikan Pangkat Online</p>	<p>Kemudahan akses dalam layanan kenaikan pangkat dan percepatan penerbitan SK kenaikan pangkat serta penerbitan SK kenaikan pangkat tepat waktu</p>	
3	Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Produk Kepegawaian Berbasis Elektronik (SISUKSES)	<p>Terwujudnya transparansi proses dan status layanan kepegawaian</p>	<p>Mempermudah memperoleh informasi berkaitan dengan dokumen kepegawaian sehingga evaluasi dan monitoring pelaksanaan penyelesaian</p>	

			dokumen pegawai dapat real time dan akurat	
			Mengurangi Human Error dalam pelaksanaan pemantauan proses penyelesaian dokumen kepegawaian	

### 2.1.6 PRESTASI/PENGHARGAAN

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT				DISELENGGARAKAN OLEH/PENYELENGGARA	KETERANGAN
		INTERNASIONAL	NASIONAL	PROVINSI	KABUPATEN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verifikasi dan Validasi Kenaikan Pangkat PNS dengan Aplikasi DOCU DIGITAL				19 -20 Oktober 2022	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Bekerjasama dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Makassar	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS periode Oktober 2022
2	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 4 Atas capaian dalam Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja
3	BKN AWARD 2022		Batam 21 Juli 2022			Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia	Peringkat 1 Atas capaian dalam Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT
4	SISTEM MERIT		Jakarta, 18 Juli 2022			Komisi Aparatur Sipil Negara	Atas Keberhasilannya Menerapkan SISTEM MERIT dalam

							Manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Perdiklat Baik
--	--	--	--	--	--	--	---

## 2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2024

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM		TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
		NOMOR/TANGGAL PENGESAHAN	TENTANG		
1	2	3	4	5	6
1	SURAT EDARAN	800.1.6.2/1823/XII/2024/BKPSDM 24 DESEMBER 2024	LARANGAN BERKEGIATAN DI LUAR KANTOR PADA JAM KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR	UNTUK MENEKANKAN KEDISIPLINAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA TERKAIT JAM KERJA	
2	SURAT EDARAN	800/1131/IX/2024/BKPSDM 17 SEPTEMBER 2024	NETRALITAS ASN DAN TENAGA NON ASN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024	UNTUK MENGHIMBAU KEPADA ASN DAN TENAGA NON ASN AGAR BERSIKAP NETRAL DALAM PEMILIHAN	

## 2.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	2	3	4

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan dalam rangka mewujudkan transparansi dan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhasil dilaksanakan merupakan hasil dari adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari masyarakat dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Kami memiliki harapan besar LKPJ ini dapat menjadi media informasi kepada masyarakat, serta dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2024 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Benteng, 15 Januari 2025

PLT. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,

**ANDI TRIYANTI MUSDALIFAH., SE.,M.M**

Pangkat : Pembina

NIP. 19780520 200604 2 036